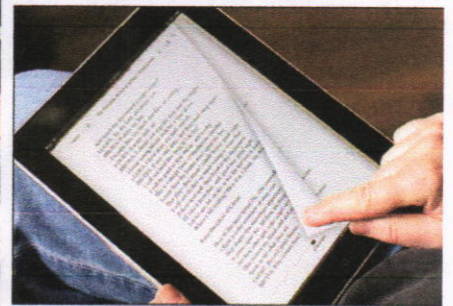




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

RENJA 2017

RENCANA KERJA 2017



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. LATAR BELAKANG.....	3
2. LANDASAN HUKUM.....	3
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	6
2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	7
3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	8
4. REVIEW TERHADAP RKPD.....	8
5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	9
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	10
2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	10
3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami telah diberi kesempatan untuk dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dengan selesainya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Tahun 2017, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang terkait yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyusunan buku selesai ini.

Diharapkan adanya saran dan masukan demi kemajuan dan kesempurnaan untuk waktu mendatang serta terciptanya semangat mendorong segenap Aparatur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kinerjanya dan lebih akuntabel

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN BLITAR



HERMAN WIDODO, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19650916 199112 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas Penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program / kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKP dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKP. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen perencanaan ini dilandasi oleh :

- a. UUD Negara RI Tahun 1945, sesuai Amandemen terakhir;
- b. UU Negara RI No. : 7, tahun 1971, *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32;
- c. UU Negara RI No. : 25, tahun 2004, *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*;
- d. UU Negara RI No. : 23, tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*;

- e. UU Negara RI No. : 33, tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*,
- f. UU Negara RI No. : 43, tahun 2007, tentang *Perpustakaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774*;
- g. UU Negara RI No. : 14, tahun 2008, tentang *Keterbukaan Informasi Publik*;
- h. Keputusan Presiden RI No. : 26 Tahun 1974, tentang *Arsip Nasional Republik Indonesia*;
- i. PP. Negara RI No. : 20, tahun 2000, tentang *Otonomi Daerah*,
- j. PP Negara RI No. : 20 Tahun 1961, tentang *Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkup Pemerintahan*;
- k. PP Negara RI No. : 34 Tahun 1979, tentang *Penyusutan Arsip*;
- l. PP Negara RI No. : 38, tahun 2007, tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*,
- m. Surat Edaran No. : SE/01/1981, tahun 1981, tentang *Penanganan Arsip Inaktif Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip*;
- n. Permendagri No. : 59 Tahun 2007, tentang *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah*;
- o. Buletin Arsip Nasional RI No. : 1 Tahun 1992, tentang *Pemeliharaan dan Penjagaan Arsip*;
- p. Perda. Kabupaten Blitar No. : 4 Tahun 2016, tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021*;
- q. Perda. Kabupaten Blitar No. : 10 Tahun 2016, tentang *Pembentukan Susunan Perangkat Daerah*
- r. Peraturan Bupati Blitar No. : 60 Tahun 2016 , tentang *Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar*

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen perencanaan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Merupakan dokumen perencanaan tertulis dengan jangka waktu pendek selama satu tahun anggaran;
- b. Merupakan pedoman pelaksanaan sasaran target kinerja program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan Dan arsip ;
- c. Merupakan pedoman jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan bidang Perpustakaan Dan Arsip ;
- d. Merupakan pedoman penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan bidang Perpustakaan Dan Arsip;
- e. Merupakan dokumen tertulis tentang anggaran dan sasaran kinerja yang sistematis.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 5. LATAR BELAKANG
- 6. LANDASAN HUKUM
- 7. MAKSUD DAN TUJUAN
- 8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

6. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
7. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
8. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
9. REVIEW TERHADAP RKP
10. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
5. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
6. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

No	No Rekening	Program/ Kegiatan	Perencanaan Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran
1	1.24.1.26.0 1.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	30.000.000	28.789.000	1.211.000	95,96%
1.1	1.24.1.26.0 1.01.16.03	Penduplikasian Dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika (digital)	30.000.000	28.789.000	1.211.000	95,96%
2	1.24.1.26.0 1.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	194.040.000	184.873.970	9.166.030	95,28 %
2.1	1.24.1.26.0 1.01.18.05	Asistensi Kearsipan	36.720.000	31.453.970	5.266.030	85,66 %
2.2	1.24.1.26.0 1.01.18.	Otomatisasi Tertib Arsip	157.320.000	153.420.000	3.900.000	97,52%
3	1.24.1.26.0 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.620.000	181.492.431	3.127.569	98,31 %
3.1	1.24.1.26.0 1.01.01.20	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	184.620.000	181.492.431	3.127.569	98,31 %
4	1.24.1.26.0 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	52.140.000	50,972.800	1.167.200	97,76 %
4.1	1.24.1.26.0 1.01.02.45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.140.000	50,972.800	1.167.200	97,76 %
5	1.24.1.26.0 1.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	350.700.000	347.963.050	2.736.950	99,22 %
5.1	1.24.1.26.0 1.01.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca	109.400.000	107.705.000	1.695.000	98,45 %
5.2	1.24.1.26.0 1.01.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	74.500.000	73.530.700	969.300	98,70 %
5.3	1.24.1.26.0 1.01.15.12	Perpustakaan Keliling	41.800.000	41.799.350	650	100%
5.4	1.24.1.26.0 1.01.15.13	Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan	125.000.000	124.928.000	72.000	99,94 %
6	1.26.01.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	19.000.000	6.000.000	76,00%
	1.26.01.01. 06.07	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	19.000.000	6.000.000	76,00%
JUMLAH			836.500.000	813.091.251	23.408.749	97,20 %

2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN BLITAR

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Presentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Memiliki Tata Kerasipan Yang Baik				0%	60%	12%	5%	5%	0	60,2%	12%	4,8%	4,8%	6,02%	0	100%	100%	96%	120,4%
2	Presentase Kunjungan masyarakat Ke perpustakaan				11%	11%	11%	11%	11%	13,75%	9,89%	8%	11%	11,85%	125%	89,9%	72,7%	100%	107,7%	
3	Presentase perpustakaan sekolah Desa / Kelurahan Yang Dibina .				25%	25%	25%	25%	30%	25,7%	21,4%	31,1%	25,7%	29,26%	102,8%	85,6%	124,4%	102,8%	97,53%	
4	Presentase Dokumen Sejarah Desa / Kelurahan Yang Sudah Diterima Oleh Kantor .				40%	20%	60%	0	0	43,1%	22,7%	63,6%	0%	0%	107,75%	113,5%	106%	0	0	
5	Presentase tenaga Kearsipan Yang memenuhi Kompetensi Dalam Mengelola Kearsipan				0	16,5%	16,5%	42%	45%	0%	16,5%	16,5%	40,5%	16,5%	0	100%	100%	96,4%	36,66%	
6	Presentase Peningkatan Jumlah Dan Judul Buku perpustakaan .				0%	5%	0%	5%	5%	0%	4,28%	0%	5,72%	3,43%	0	85,6%	0	114,4%	68,6%	

3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Isu Internal

- a. Isu terkait tugas pokok dan fungsi SKPD
 - Meningkatnya minat baca masyarakat
 - Meratanya tingkat akses masyarakat terhadap informasi
 - Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi
 - Berjalannya kegiatan kearsipan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dengan tertib
- b. Sumber Daya Manusia
 - Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - Belum tercukupinya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- c. Sarana dan Prasarana
 - Lokasi Perpustakaan Umum yang masih di wilayah Kota Blitar mengakibatkan pelayanan belum tepat sasaran pada masyarakat Kabupaten Blitar
 - Kebutuhan Gedung Perpustakaan yang nyaman untuk meningkatkan jumlah kunjungan
 - Kebutuhan tempat simpan arsip statis (Depo Arsip) yang semakin bertambah
- d. Kemampuan Anggaran Daerah
 - Belum mendapat prioritas anggaran daerah dalam setiap penyusunan anggaran daerah

2. Isu Eksternal

- a. Perpustakaan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pelayanan di perpustakaan sudah merupakan keharusan untuk efisiensi dan memberi kemudahan baik pada masyarakat maupun untuk administrasi. Sedangkan pemanfaatan koleksi dalam bentuk digital juga semakin berkembang, bukan saja yang bersifat tekstual namun juga ke arah audio visual juga semakin diminati masyarakat.
- b. Kearsipan

Pelaksanaan kegiatan kearsipan berbasis manual saat ini dipandang sebagai hal yang merepotkan dan menambah beban kerja pegawai, sehingga perlu diatasi dengan cara pengalihan

4. REVIEW TERHADAP RKPD

Dalam dokumen RKPD Tahun 2018, Kabupaten Blitar menyusun tema pembangunan “Penguatan SDM dan Usaha Mikro serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur”. Dengan tema pembangunan tersebut disusunlah program prioritas daerah sebagai berikut :

- I. Penguatan SDM di bidang Pendidikan, Kesehatan dan penumbuhanwirausaha baru
- II. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
- III. Pengembangan kawasan perdesaan
- IV. Peningkatan Infrastruktur

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah bertugas untuk melaksanakan dan menyukseskan program prioritas diatas terutama Program ke I” Penguatan SDM di bidang Pendidikan, Kesehatan dan penumbuhanwirausaha baru” dengan Program kegiatan “Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan” dimana dalam hal ini yang bertindak sebagai penanggungjawab SKPD adalah Dinas Pendidikan. Dinas Perpustakaan dan Arsip akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam upaya mencapai hasil yang maksimal dalam program kegiatan tersebut

5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menjalankan layanan pada masyarakat, Dinas perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar tentunya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik pada masyarakat ini tentunya belum dapat memenuhi semua harapan maupun kepuasan masyarakat. Harapan / kepuasan masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip inilah yang seringkali disampaikan pada kami dan mendasari dibuatnya, dikembangkannya program maupaun kegiatan dimana setiap tahunnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip selalu bertambah dan berkembang.

Untuk Tahun 2018, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berhasil kami himpun dapat kami sampaikan sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Kegiatan ekstra pelayanan perpustakaan	Perpustakaan Umum dan Taman Baca Masyarakat	Jumlah Hari ekstra pelayanan	80 hari	Masukan ibu-ibu PKK dan PAUD
2	Kegiatan pembinaan perpustakaan	Blitar	Jumlah perpustakaan	80	Berdasarkan masukan petugas pengelola perpustakaan sekolah
6	Perpustakaan Keliling	Blitar	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	100	Berdasarkan usulan masyarakat
8	Pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi	Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan kearsipan berbasis TI	60	Berdasarkan kebutuhan perubahan organisasi

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memperhatikan arah kebijakan nasional dibidang perpustakaan dan arsip dalam hal ini Lembaga yang membidangi untuk lingkup nasional dan kebijakannya adalah sebagai berikut :

a. Perpustakaan Nasional

- i. Peningkatan gemar membaca
- ii. Pengembangan koleksi Indonesiana yang lengkap dan mutakhir
- iii. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK
- iv. Pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa
- v. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar
- vi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

b. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

- i. Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang meliputi (a) pengembangan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (b) penyusunan NSPK sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: (b1) Pembinaan; (b2) Pengelolaan Arsip; (b3) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (b4) Organisasi; (b5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (b6) Prasarana dan Sarana Kearsipan; (b7) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; (b8) Sosialisasi Kearsipan; (b9) Kerja Sama; dan (b10) Pendanaan.
- ii. Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu: (a) penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi.
- iii. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2017
1	Meningkatkan minat baca masyarakat dan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,63%

2	Meningkatkan minat baca masyarakat dan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Persentase Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki kualitas tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	13,3%
3	Meningkatkan minat baca masyarakat dan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Meningkatnya jumlah dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	Persentase Organisasi Pemerintah Daerah yang dokumen / arsipnya telah diselamatkan dan dilestarikan	8 %

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BLITAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Rencana Tahun 2017		Prakiraan Maju Tahun 2018	
				Target Capaian Kinerja	RP	Target Capaian Kinerja	RP
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<i>Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan</i>	415.354 (36,01%)	36,24%	439.009.000	36,24%	439.009.000
	Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	0	80	17.850.500	80	17.850.500
	Kegiatan Pengembangan Minat Baca	Jumlah kegiatan lomba yang diikuti / diadakan	4	4	133.150.000	4	133.150.000
	Kegiatan Ekstra Pelayanan Perpustakaan	Jumlah tambahan hari lembur kerja untuk pelayanan perpustakaan	0	80	18.098.500	80	18.098.500
	Kegiatan Pengadaan bahan pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang diadakan	9718	1000	107.588.000	1000	107.588.000
	Kegiatan Perpustakaan Keliling	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	166	106	50.050.000	106	50.050.000
	Kegiatan Promosi Perpustakaan	Jumlah Kegiatan promosi perpustakaan yang diikuti / diadakan	0	1	8.272.000	1	8.272.000
	Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perpustakaan Umum dan Depo Arsip	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum	1	1	104.000.000	1	104.000.000
	Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan berbasis Teknologi Informasi	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	0	20 %	205.970.000	20 %	205.970.000
	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Software Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan sosialisasi penerapan software sistem informasi kearsipan	0	60	28.900.000	60	28.900.000
2	Kegiatan Pemasangan Software Sistem Informasi Kearsipan di Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan software sistem informasi kearsipan	0	60	42.070.000	60	42.070.000
	Kegiatan penyusunan naskah akademik dan ranperda tentang tata kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar	Jumlah Naskah Akademik dan Ranperda tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang tersusun	0	1	135.000.000	1	135.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi berbasis teknologi informasi di organisasi perangkat daerah	0	13,33%	57.230.000	13,33%	57.230.000
	Kegiatan Asistensi Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan yang berkompeten di organisasi perangkat daerah	5	40	57.230.000	40	57.230.000

